

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat di wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di masa otonomi daerah yang resmi dimulai di Indonesia pada 1 Januari 2001, daerah diberi kesempatan untuk berinovasi dalam menemukan sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah guna menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merujuk pada pemasukan yang diterima oleh suatu wilayah, yang bersumber dari kekayaan yang ada dalam wilayah tersebut, dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan undang undang yang berlaku (Maharani R et al., 2023).

Di antara berbagai opsi pendapatan daerah, Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-undang mengenai pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak serta retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, diatur bahwa penerimaan daerah dalam kerangka desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah serta pembiayaan (Syahrial & Sutoyo 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa kategori PAD dibedakan menjadi empat tipe pendapatan yaitu:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau organisasi. Kewajiban ini bersifat wajib dan ditetapkan oleh hukum, tanpa ada imbalan langsung, dan dan tersebut dialokasikan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan jenis pajak daerah yaitu:

- a. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air
- 5) Pajak Rokok

- b. Pajak Daerah Kabupaten terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan

- 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan suatu jenis pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan tertentu atau izin yang diberikan, yang ditujukan khusus untuk kepentingan individu atau entitas (Amelinda, 2017). Retribusi Daerah terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Alat Berat Milik Pemerintah Daerah
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diantaranya:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Perizinan yang dimaksud yaitu mengadakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Dengan dasar pemberian pemerintah daerah tidak harus dipungut oleh retribusi. Adapun jenis-jenis Retribusi Perijinan Tertentu diantaranya:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Trayek Kendaraan
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain meliputi bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerjasama dengan pihak ketiga, serta bagian laba dari BUMD yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Kredit Usaha Rakyat (PDR). Tidak hanya mencakup jumlah orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Lainnya jenis PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil dari menjual aset daerah yang tidak dipisahkan sendiri
- b. Hasil dari memanfaatkan atau mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga dari deposito
- e. Mendapatkan uang ganti rugi
- f. Mendapatkan komisi, potongan, atau bentuk lainnya yang muncul karena menjual atau menggadaikan barang, jasa, atau keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pendapatan dari denda karena keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan
- g. Pendapatan dari denda pajak
- h. Pendapatan dari eksekusi jaminan
- i. Pendapatan dari pengembalian
- j. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

2.1.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal pertama kali diusulkan oleh Wallace E. Oates (1972) melalui Teorema Desentralisasi. Teori ini menjelaskan bahwa pelayanan publik dan pengelolaan uang daerah akan lebih efisien jika dikelola oleh pemerintah setempat, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal kebutuhan, selera, dan situasi masyarakatnya. Dalam kerangka teori ini,

desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada daerah untuk mencari pendapatan sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar bisa mandiri secara keuangan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Teori ini juga menyatakan bahwa semakin besar kewenangan fiskal yang dimiliki daerah, semakin besar kemampuan daerah itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui cara-cara seperti pengelolaan investasi, penggunaan sumber daya secara optimal, serta penyaluran uang publik yang tepat sasaran (Puspita et al., 2024).

2.1.1.2 Teori Kemandirian Fiskal

Teori kemandirian fiskal menurut Halim (2004) adalah cara menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan layanan publik secara mandiri, dengan menggunakan sumber pendapatan dari dalam daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa terlalu bergantung pada dana yang dikirim oleh pemerintah pusat. Adapun rumus kemandirian fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat kemandirian fiskal menunjukkan seberapa besar daerah mampu mengelola sumber daya ekonomi lokal, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, agar dapat meningkatkan pendapatan fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal, yang menunjukkan bahwa otonomi daerah berhasil mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Fitriyani et al., 2017).

2.1.2 Penerimaan Modal Dalam Negeri

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak dan benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan untuk menjalankan usaha selama modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Kriteria penanaman modal dalam negeri harus memenuhi dua unsur utama, yaitu sumber modal harus berasal dari dalam negeri. Penetapan kedua unsur ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanaman modal yang tercatat dalam administrasi benar-benar murni sebagai penanaman modal dalam negeri, dan bukan berasal dari sumber lainnya. Kebijakan dalam penanaman modal dalam negeri untuk menciptakan iklim penanaman modal yang sehat di masa mendatang adalah:

1. Mengurangi biaya ekonomi tinggi pada setiap tahapan penanaman modal
2. Memperbaiki kebijakan penanaman modal, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan penanaman modal, serta melakukan reformasi kelembagaan penanaman modal
3. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undangan antara

pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi usaha di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, dan efisiensi dalam biaya serta waktu pengurusan.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tidak menolak perlindungan bagi investasi dari dalam negeri, seperti yang terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Pasal13 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah wajib menentukan bidang usaha yang disediakan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang tersedia untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
2. Pasal13 ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui berbagai program seperti kemitraan, peningkatan daya saing, dorongan inovasi, perluasan pasar, serta penyebaran informasi secara luas.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penerimaan modal dalam negeri telah ditemukan bidang usaha yang terbuka untuk investasi.

Bidang tersebut antara lain:

1. Pertanian
2. Perkebunan
3. Kehutanan
4. Perikanan
5. Peternakan

6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pengangkutan
9. Perumahan Rakyat
10. Kepariwisataaan
11. Sarana dan Prasana
12. Usaha-usaha produktif lainnya

2.1.2.1 Teori Harrod-Domar

Teori Harrod–Domar muncul antara tahun 1939 sampai 1946 oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar. Teori ini menekankan bahwa investasi merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada tingkat tabungan dan rasio modal-output. Semakin tinggi tingkat tabungan dan investasi, serta semakin efisien penggunaan modal atau *Incremental Capital-Output Ratio* yang rendah maka semakin cepat pula laju pertumbuhan ekonomi negara atau daerah. Teori ini penting dalam konteks pembangunan daerah karena menghubungkan peran investasi dengan peningkatan produksi dan kapasitas ekonomi yang akan memperluas sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Sulong et al., 2023).

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk yang sudah memenuhi usia kerja dan bekerja (Kependudukan & Nasional, 1994). Mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja bisa membantu melihat seberapa besar potensi penduduk untuk bekerja. Jika jumlah angkatan kerja besar, maka potensi

penduduk untuk bekerja juga tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021). Semakin banyak angkatan kerja, semakin sedikit orang yang tidak bekerja (Payaman, 1998).

Tingkat partisipasi angkatan kerja bisa dipengaruhi beberapa hal menurut Kodrat (2007), yaitu usia, jenis kelamin, dan peluang memiliki pekerjaan. Usia memengaruhi karena banyak orang yang masih sedang sekolah, sehingga bekerja belum menjadi tanggung jawab mereka. Jenis kelamin juga berpengaruh, karena perempuan sering dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga, sehingga jumlah partisipasi kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara itu, peluang mendapatkan pekerjaan juga memengaruhi tingkat partisipasi kerja. Tingkat partisipasi kerja yang tinggi berarti peluang bekerja juga besar. Peluang bekerja yang tinggi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih makmur (Sukirno, 2006). Selain itu, menurut Hukom (2014), ada siklus di mana penyerapan tenaga kerja di bidang non pertanian tidak mengurangi penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian, sehingga terjadi surplus tenaga kerja yang bisa digunakan kembali di sektor lain. Hal ini bisa mengubah struktur ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Faelassuffa & Yuliani, 2021).

2.1.4.2 Teori Penawaran Tenaga Kerja (*Labor Supply Theory*)

Teori Penawaran Tenaga Kerja berasal dari ekonomi neoklasik dan pertama kali dijelaskan oleh Alfred Marshall pada tahun 1890 melalui bukunya *Principles of Economics*. Kemudian teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli ekonomi tenaga kerja seperti George J. Borjas (1989, 2016) serta Ronald

Ehrenberg dan Robert Smith (1988, 2017). Teori ini menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk bekerja di pasar ditentukan oleh berbagai insentif ekonomi, seperti tingkat upah, peluang kerja, dan kondisi ekonomi lokasi. Semakin banyak peluang kerja yang ada di suatu daerah, maka semakin tinggi pula jumlah orang yang bekerja, yang terlihat dalam angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Teori ini terkait erat dengan desentralisasi fiskal karena peningkatan TPAK menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang memperkuat partisipasi tenaga kerja, sehingga memperluas sumber pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Borjas, 2020).

2.1.4 Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah cara mengukur efisiensi proses produksi pertanian, terutama untuk tanaman padi. Produktivitas ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah gabah kering giling (GKG) per satuan luas panen. Satuan yang digunakan adalah ton per hektar (ton/ha) atau kuintal per hektar (ku/ha), dengan 1 ton setara 10 kuintal. Produktivitas ini menjadi petunjuk penting dalam menilai sejauh mana suatu sistem pertanian berhasil dan sekaligus kemampuan petani dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, produktivitas menunjukkan seberapa efisien penggunaan lahan pertanian dalam menghasilkan padi. (Alwi, 2025). Secara umum, pengukuran produktivitas padi dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas Padi} = \frac{\text{Produksi Padi (ton)}}{\text{Luas Panen (hektar)}}$$

Banyak penelitian menunjukkan bahwa hasil panen padi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi alam, penggunaan teknologi, situasi sosial dan ekonomi petani, serta kebijakan pemerintah. Susilowati dan Maulana (2012) menyebutkan beberapa hal yang berpengaruh terhadap hasil panen padi, seperti kondisi alam seperti hujan, kesuburan tanah, dan sistem irigasi; teknologi seperti penggunaan benih baik, pupuk yang tepat, penggunaan mesin, dan cara mengendalikan hama; situasi sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan petani, pengalaman bertani, dan akses terhadap pinjaman atau bantuan pertanian; serta kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, bantuan benih, dan program untuk meningkatkan pertanian.

Simatupang dan Mardianto (2021) mengatakan bahwa penerapan teknologi modern serta dukungan kebijakan pemerintah, seperti subsidi pupuk dan program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi padi nasional. Penelitian Hastuti dan Suryani (2020) ga menunjukkan bahwa metode budidaya seperti *System of Rice Intensification* (SRI) mampu meningkatkan hasil panen hingga 15–20% lebih baik dibandingkan metode biasa. Dengan demikian, penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dan bantuan kebijakan pemerintah menjadi hal penting dalam meningkatkan hasil panen padi (Triwidia, 2024).

Peningkatan produktivitas pertanian adalah syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena hasil surplus dari sektor ini dapat mendorong peningkatan modal, memperkuat ketersediaan pangan, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020)

Menurut Arifin (2022), peningkatan hasil produksi padi secara signifikan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan dan perbaikan kualitas hidup para petani. Selain itu, pertumbuhan produktivitas juga membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan nasional. Dengan ketersediaan berbagai jenis pangan yang cukup, tekanan inflasi akibat kenaikan harga beras bisa dikurangi, sehingga stabilitas ekonomi daerah lebih terjaga (Sukmawan & Hartono, 2021). Dalam konteks ini, peningkatan produktivitas padi tidak hanya memengaruhi sektor pertanian semata, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas perekonomian makro dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional yang dikemukakan oleh Richardson (1973) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Daerah yang berhasil mengembangkan sektor unggulnya, seperti sektor pertanian, akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih luas lagi. Hal ini terjadi karena efek pengganda yang berdampak pada sektor perdagangan, jasa, dan industri pendukung.

Dalam konteks ini, peningkatan produktivitas padi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor basis seperti pertanian sangat penting

dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal wilayah (Fitri & Nainggolan, 2022).

2.1.5 Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata berdasarkan pada kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia, seperti wisata minat khusus (Kuntari & Lasally, 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya tarik wisata diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai dalam bentuk keanekaragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Keanekaragaman tersebut menjadi dasar dalam mengklasifikasikan berbagai jenis wisata. Sumber daya wisata di suatu daerah dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi (Pendit, 2002).

Berdasarkan potensi atau sumber daya yang dipakai, daya tarik wisata dibagi menjadi tiga jenis, yaitu alam, budaya, dan buatan (UU no. 10 tahun 2009).

1. Daya tarik alam ialah keunikan dan keanekaragaman yang datang dari lingkungan alam, baik darat maupun lautan.
2. Daya tarik budaya merujuk pada hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Daya tarik ini dibagi menjadi berwujud serta tidak berwujud, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2011.
3. Daya tarik buatan (wisata minat khusus) adalah hasil kreasi buatan manusia yang tidak alami serta kegiatan manusia di luar wilayah wisata alam dan budaya. Menurut PP nomor 50 tahun 2011, kategori daya tarik ini dibagi lagi menjadi 23 jenis daya tarik wisata buatan.

2.1.5.1 Teori *Tourism-Led Growth Hypothesis*

Teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* pertama kali diperkenalkan oleh Balaguer dan Cantavella-Jordá pada tahun 2002 melalui penelitian mereka yang menggambarkan hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori ini diperluas oleh para peneliti lain seperti Lee dan Chang (2008) serta Sokhanvar (2023). Teori ini menjelaskan bahwa sektor pariwisata bisa menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah wisatawan, menambah pengeluaran mereka, dan menciptakan peluang kerja. Dalam teori ini, keunikan dan daya tarik suatu tempat merupakan faktor utama yang menentukan berapa banyak wisatawan yang datang ke suatu daerah. Teori ini memiliki peran penting dalam sistem desentralisasi keuangan karena pengembangan daya tarik wisata memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sokhanvar, 2023).

2.1.6 Elastisitas

Elastisitas merupakan derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas digunakan untuk meramalkan hal yang akan terjadi jika harga barang/jasa dinaikkan, dengan kata lain elastisitas merupakan perbandingan perubahan proporsi dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Elastisitas dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Elastisitas permintaan, merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan

permintaan. Macam-macam elastisitas permintaan:

- 1) Permintaan inelastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta < 1$.
- 2) Permintaan elastis, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta > 1$.
- 3) Permintaan unitary, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 1$.
- 4) Permintaan inelastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = 0$.
- 5) Permintaan elastis sempurna, permintaan dapat dikatakan inelastis apabila $\beta = \infty$

b. Elastisitas penawaran merupakan suatu alat ukur kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan penawaran. Macam-macam elastisitas permintaan:

- 1) Penawaran inelastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien < 1 .
- 2) Penawaran elastis, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien > 1 .
- 3) Permintaan unitary, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 1$.
- 4) Penawaran inelastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= 0$.
- 5) Penawaran elastis sempurna, penawaran dapat dikatakan inelastis apabila nilai koefisien $= \infty$

Menurut Gujarati & Porter (2009), elastisitas dalam model ekonometrika log-linear dapat diinterpretasikan sebagai persentase perubahan pada variabel dependen

akibat perubahan satu persen pada variabel independen dilihat dari *coefficient variance*-nya dengan asumsi variabel lainnya konstan. Adapun bentuk elastisitasnya:

$$1) \beta_1 \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial \text{Log}X_1}$$

$$2) \beta_2 \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial X_2}$$

$$3) \beta_3 \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial \text{Log}X_3}$$

$$4) \beta_4 \frac{\partial \text{Log}Y}{\partial \text{Log}X_4}$$

Keterangan:

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Elastisitas variabel terikat terhadap variabel bebas

∂ : Persentase perubahan variabel

$\text{Log}Y$: Variabel terikat

$\text{Log}X_1, X_2, \text{Log}X_3, \text{Log}X_4$: Variabel bebas

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sisrawati Pauli, Muhammad Amir, Fitri Hadi, Rifi Fazrina (2024) “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan PMDN terhadap PAD di Pulau Sulawesi pada tahun 2017- 2021”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: PMDN Metode: Data Panel	Variabel x: 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Belanja Modal Lokasi penelitian: Provinsi Sulawesi	Variabel pertumbuhan ekonomi negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, belanja modal dan PMDN positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi 2017- 2021	JSEP: Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan Vol 2. No. 1 Juli 2024 E-ISSN 3021- 8603
2.	Adita Putri (2024) “Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2021-2022	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: Jumlah objek wisata Metode: Data Panel	Variabel x: 1. Jumlah penduduk 2. Jumlah wisatawan 3. Jumlah kendaraan bermotor Lokasi Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Variabel jumlah penduduk dan jumlah wisatawan berpengaruh positif signifikan terhadap sedangkan jumlah objek wisata dan jumlah kendaraan bermotor tidak signifikan terhadap PAD	Universitas Islam Indonesia

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Dhea Rizki, Murtala, Mutia Rahmah (2022) “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah	Variabel x: 1. Pengeluaran pemerintah 2. Jumlah penduduk 3. PDRB 4. Pajak Daerah Lokasi Penelitian: Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD serta pajak daerah berpengaruh negatif terhadap PAD di Kota Binjai	Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol 30. No. 03 30 Desember 2022 E-ISSN : 2615 126X
4.	Salsabilla Ella Sofie (2022) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2020	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: PMDN	Variabel x: 1. PMA 2. Jumlah penduduk Lokasi Penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel PMA positif tidak signifikan, PMDN negatif tidak signifikan, dan jumlah penduduk positif signifikan terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005- 2020	Universitas Islam Indonesia

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Raishsha Kezia (2024) “Pengaruh Nilai Ekspor, PMA, dan PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Papua Periode tahun 2003- 2023”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: PMDN	Variabel x: 1. Ekspor 2. PMA Lokasi Penelitian: Papua Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel Ekspor dan PMDN positif signifikan terhadap PAD sedangkan PMA negatif signifikan terhadap PAD di Papua 2003- 2023	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
6.	Gagas Bahrul Ilmi dan Hilma Mutiara Winata (2025) “Pengaruh Wisatawan dan Daya Tarik Wisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui PAD Kabupaten Bandung”	Variabel y1: Pendapatan Asli Daerah Variabel y2: Pertumbuhan Ekonomi Variabel x: Daya Tarik Wisata	Variabel x: Kunjungan wisata Lokasi Penelitian: Kabupaten Bandung Metode Penelitian: PLS- SEM	Variabel kunjungan wisata berpengaruh signifikan daya tarik wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan keduanya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara (JEAMA) Vol. 4 No.1 Agustus 2025 E-ISSN : 2964- 3945

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Ayu Rai Wulan Puspita Sari dan Made Heny Urmila Dewi (2024) “Pengaruh Daya Tarik Wisata, Kunjungan Wisatawan dan Lama Tinggal Wisatawan terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Bali”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: Daya tarik wisata Metode Penelitian: Analisis Data Panel	Variabel x: 1.Kunjungan wisatawan 2. Lama tinggal wisatawan Lokasi Penelitian: Kabupaten/kota Provinsi Bali	Variabel daya tarik wisata positif tidak signifikan, kunjungan wisata positif signifikan, lama tinggal wisatawan berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD kabupaten/kota Provinsi Bali	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 13, No. 3, Maret 2024 E-ISSN : 2337- 3067
8.	Anggrismono dan Lia Ayu Ma’rifatul Ariva (2023) “Dampak Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Lokasi Penelitian: Jawa Tengah Metode Penelitian: Analisis Data Panel	Variabel x: 1. Jumlah wisatawan 2. Belanja daerah 3. Jumlah hotel 4. Jumlah restoran	Variabel jumlah wisatawan, belanja daerah dan jumlah hotel berpengaruh positif signifikan sedangkan jumlah restoran negatif signifikan terhadap PAD kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhamadiyah Palopo Vol.9 No. 1, Juni 2023 E-ISSN : 2339- 1529

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Lilis Hidayatullah Iftihanah & Alief Rakhman Setyo (2023) “Pengaruh Sektor Pertanian, Komoditas Produksi dan Harga Jual Kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah	Variabel x: 1. Sektor pertanian 2. Komoditas produksi 3. Harga jual kopi Lokasi Penelitian: Suoh Provinsi Lampung Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel sektor pertanian, komoditas produksi dan harga jual kopi positif signifikan terhadap PAD Suoh Provinsi Lampung	<i>Independent: Jurnal Of Economics</i> . Vol. 3 No. 2, Tahun 2023 E-ISSN : 2798 - 5008
10.	Yuniar Sri Haryati (2017) “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja dan PDRB terhadap PAD di Kota Jayapura”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah	Variabel x: 1. Tingkat Investasi (PMA & PMDN) 2. PDRB 3. Tenaga Kerja Lokasi Penelitian: Kota Jayapura Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel tingkat investasi positif tidak signifikan, tenaga kerja positif tidak signifikan dan PDRB positif signifikan terhadap PAD Kota Jayapura	<i>Jurnal Ekonomi Regional Unimal</i> Vol. 01 No. 02 Agustus 2018 E-ISSN : 2615-126X

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Muhammad Danuega Putra Arista (2022) “Pengaruh PMA, PMDN, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2022”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: PMDN	Variabel x: 1. Jumlah penduduk 2. Pengeluaran perkapita Lokasi Penelitian: Provinsi Jawa Barat Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel PMDN dan pengeluaran perkapita tidak signifikan terhadap PAD sedangkan variabel PMA berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat tahun 2006- 2022	Universitas Islam Indonesia
12.	Aditya Ananta Ashari dan Ririt Iriani S (2024) “Analisis Pengaruh Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: TPAK	Variabel x: 1. Retribusi Daerah 2. Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian: Kota Malang Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel jumlah penduduk dan TPAK berpengaruh positif dan signifikan sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Malang.	Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah Vol. 6 No.5, 2024 E-ISSN :2656- 4351

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Annas Nashiruddin & Banu Witoni (2024) “ <i>The Influence of Gross Regional Domestic Product, Investment, and Population Size on Regional Original Income</i> ”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Lokasi Penelitian: Provinsi Jawa Tengah	Variabel x: 1. PDRB 2. Investasi 3. Jumlah penduduk Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap PAD, sedangkan investasi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah	<i>Costing: Journal of Economic, Business and Accounting</i> Vol. 7 No.2 Tahun 2024
14.	Heri Hermawan, Fajar Ramdhani, Intan Ramdinatulfitri (2022) “Peran Sektor Industri Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi”	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah Variabel x: TPAK	Variabel x: 1. PDRB industri 2. Jumlah Industri Lokasi Penelitian: Kota Bekasi Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel tenaga kerja positif tidak signifikan, sedangkan PDRB industri dan jumlah industri positif signifikan terhadap PAD di Kota Bekasi.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 3. 2022 ISSN: 2776- 4567

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Nurnila Sari, Fahrudin Zain, Ivan Rahmat, Herwin Mopangga, Fitri Hadi (2025) "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara"	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah	Variabel x: 1. Pajak Daerah 2. Hasil pengolahan kekayaan 3. Retribusi daerah 4. Komponen PAD Lokasi Penelitian: Sulawesi Tenggara Metode Penelitian: Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel pajak daerah dan hasil pengolahan kekayaan positif signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah dan komponen PAD tidak signifikan terhadap PAD di Sulawesi Tenggara	Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No.2 Tahun 2025
16.	Gaby Dainty Juliet Roring, Nadya Lestari Vega Br. Ginting, Dasyat Immanuel Rombon (2025) "Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara"	Variabel y: Pendapatan Asli Daerah	Variabel y2: Pertumbuhan ekonomi Variabel x: 1. Sektor Pertanian 2. Retribusi Daerah 3. Belanja Pemerintah Lokasi Penelitian: Sulawesi Utara Metode Penelitian: Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel sektor pertanian dan belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara	Jurnal Bisnis Net Vol. 8 No. 1 Juni 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antar daerah, di mana hanya beberapa wilayah yang memiliki PAD relatif tinggi, sementara sebagian besar kabupaten masih bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi ini mencerminkan belum meratanya kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal, yang dipengaruhi oleh rendahnya investasi, kualitas partisipasi tenaga kerja yang terbatas, dominasi sektor pertanian, serta belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih lemah, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor ekonomi utama yang memengaruhi PAD.

Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat dari bagaimana investasi domestik yang dikelola secara efisien mendorong peningkatan output dan aktivitas ekonomi, sehingga memperkuat keuangan pemerintah daerah (Oktaviani & Azansyah, 2025). Ketika PMDN meningkat, maka aktivitas ekonomi akan berkembang, menciptakan lebih banyak pekerjaan, serta meningkatkan produksi barang dan jasa. Kondisi ini secara langsung memperluas sumber penerimaan daerah, seperti pajak, biaya perizinan serta retribusi daerah, sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini diperkuat oleh penelitian Sisrawati et al. (2024), Raisha (2024) serta Lubis dan Ani (2021) menunjukkan bahwa PMDN berdampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ini menjelaskan bahwa investasi

domestik bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Disisi lain beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda, Danuega (2022), Salsabilla (2022), dan Napitupulu et al. (2024) menemukan bahwa PMDN tidak signifikan terhadap PAD di beberapa daerah ini menunjukkan bahwa investasi belum sepenuhnya produktif atau tidak mampu memberikan efek ekonomi jangka pendek yang kuat. Dengan demikian, efektivitas PMDN dalam meningkatkan PAD sangat bergantung pada kualitas, pengelolaan, dan pemilihan sektor investasi, sesuai prinsip teori Harrod-Domar.

Menurut Teori Penawaran Tenaga Kerja, keputusan seseorang untuk bekerja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti gaji dan peluang kerja. Dalam hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), naiknya TPAK menunjukkan semakin banyak orang usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (Borjas, 2016). Hal ini memperluas kemampuan daerah dalam memproduksi barang dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Semakin tinggi partisipasi tenaga kerja, maka semakin tinggi pula produksi di sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, pendapatan masyarakat juga meningkat, serta potensi penerimaan daerah melalui pajak, retribusi, dan kegiatan usaha meningkat. Akibatnya, PAD juga meningkat

Dalam penelitian oleh Aditya dan Ririt (2024) ditemukan bahwa peningkatan TPAK berdampak positif pada PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi tenaga kerja, semakin besar kontribusi aktivitas ekonomi terhadap pendapatan daerah. Namun, Heri et al. (2022) menemukan bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan

TPAK belum tentu langsung meningkatkan PAD jika kualitas tenaga kerja dan peluang kerja masih terbatas. Dengan demikian, dampak TPAK terhadap PAD sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja dan kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, sesuai dengan Teori Penawaran Tenaga Kerja.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan output sektor unggulan di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek multiplikatif pada pendapatan dan kegiatan ekonomi masyarakat (Tarigan, 2014). Hubungan antara tingkat produktivitas padi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat dari bagaimana kenaikan hasil panen meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha pertanian, mendorong berbagai aktivitas ekonomi lokal, serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah, seperti PBB-P2, pajak usaha, serta retribusi pasar, gudang, dan irigasi.

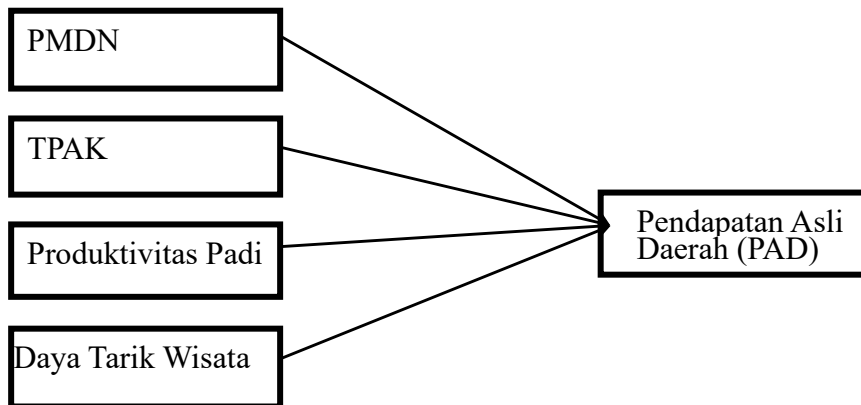
Penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh produktivitas padi terhadap kinerja ekonomi daerah yang beragam. Triwidia et al. (2024) menemukan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani, yang secara tidak langsung meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Sementara itu, Muliati, Juliansyah, dan Rozalina (2022) menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengindikasikan bahwa tanpa dukungan distribusi hasil panen yang efektif dan manajemen pasar yang baik, peningkatan produktivitas padi belum tentu memberi efek positif pada PAD. Temuan ini menekankan pentingnya strategi

pengelolaan hasil panen dan dukungan infrastruktur untuk memastikan kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan daerah optimal.

Berdasarkan teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi (Nur Jihan, 2025). Dalam hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dan beragam daya tarik wisata suatu daerah, maka semakin tinggi potensi kunjungan wisatawan yang akan mendorong penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi wisata. Selain itu, aktivitas pariwisata juga mendorong perkembangan sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan jasa, sehingga memperluas basis penerimaan daerah.

Secara empiris, Putri et al. (2023) menemukan bahwa pengembangan destinasi wisata berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Namun, penelitian Gagas dan Hilma (2025) menunjukkan bahwa daya tarik wisata berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pariwisata ke dalam strategi pembangunan ekonomi lokal.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis atau dugaan sementara atas penelitian perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan dengan permasalahan, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu, hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.
2. Diduga secara bersama-sama penanaman modal dalam negeri, tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas padi daya tarik wisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2024.